

PERSOALAN APPROACH DALAM MEMPOLAKAN PENDIDIKAN DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN NASIONAL

Daoud JOESOEF

Pendahuluan*

"Development is the new name
for peace" (Paus Paul,
Popularum Progressio)

Setiap orang Indonesia, terutama condokiawan, karyawan, mahasiswa dan politisi, kini sadar dan borsepakat bahwa Indonesia perlu membangun, sesodikitnya membangun perekonomiannya. Pembangunan memang perlu karena yang tidak dapat terus menerus kita pikul dan biarkan bukanlah kemiskinan dan "underdevelopment", berhubung kita telah "biasa" dengan keadaan seperti itu. Yang tidak dapat kita pikul dan biarkan berlarut-larut adalah perkembangan masyarakat yang semakin lama semakin pincang di bidang pembangunan, terus menerus menjurus ke arah ketidakadilan, begitu menyolok mata dan menusuk perasaan sehingga menggugah hati nurani, tidak dapat lagi ditanggung oleh kesabaran dan bila dibiarkan dapat menghancurkan sendi-sendi negara dan masyarakat merdeka sebagaimana yang dicita-citakan di dalam tahun 1945 dan masa-masa perjuangan nasional sebelumnya. Keadilan yang diidam-idamkan tersebut bukanlah seharusnya pembagian kemiskinan yang lebih merata tetapi pembagian-pembagian yang lebih merata dari tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Maka itu disadari perlu adanya satu usaha pembangunan taraf nasional, yang dilakukan secara sadar, teratur, coherent, consistent dan kontinu; pendek kata "usaha pembangunan yang berencana dan bertahap".

*Dalam menyusun karangan ini penulis banyak diilhami oleh karya Wolfgang Ambruster dan Hans-Joachim Bodenhofer, Research Associates dari Max-Planck-Institute for Educational Research, Berlin Barat (lihat daftar bacaan pada akhir karangan ini); tetapi pendapat diajukan oleh penulis di dalam karangan ini, termasuk kekeliruan dan kelemahan yang mungkin terdapat di dalamnya, adalah menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari penulis sendiri.

Di dalam usaha pembangunan ini peranan pendidikan cukup menentukan. Sumbangan pendidikan pada pembangunan ekonomi jelas dibuktikan oleh kenyataan. Sesuatu pembangunan nasional tidak hanya tergantung pada sumber-sumber dan kekayaan alam yang dikandung oleh bumi nasional yang bersangkutan. Sebab, bila sumber-sumber alam inilah yang menentukan maka negara-negara Skandinavia ataupun Switserlan akan tergolong pada negara yang termiskin di dunia, sedangkan negara-negara Arab yang buminya banyak mengandung minyak, ataupun Congo, Brazilia dan Indonesia yang buminya banyak mengandung mineral, akan tergolong pada negara-negara terkaya. Di antara daratan serta lautan sesuatu negara dengan pendapatan per capita yang dimiliki oleh rakyatnya, kiranya terdapat satu variabel penting dan variabel yang menghubungkan kedua hal tersebut jelas bukan hanya kekayaan dan sumber-sumber alam yang dikandung oleh daratan maupun lautan tersebut. Variabel tersebut adalah "pendidikan".

Bila diakui betapa pentingnya peranan dan sumbangan pendidikan bagi usaha-usaha pembangunan, dan bila pembangunan ini hendak dilakukan secara berencana, selanjutnya lalu approach manakah yang hendak dipakai di dalam usaha mengintegritir pendidikan ke dalam usaha pembangunan tersebut. Perseoran approach inilah yang hendak dibahas oleh karangan ini dan analisisnya dibatasi pada hanya dua jenis approach pokok. Maka itu untuk keperluan pembahasan, analisa karangan akan dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama membahas "approach keperluan akan tenaga-kerja" dan yang kedua meneliti "approach kulturil dari pembentukan tenaga-kerja". Seperti lazimnya, karangan ini akan ditutup dengan satu kesimpulan.

I. Approach keperluan akan tenaga-kerja

"We are concerned with the nature and causes of the Poverty of Nations. And do not let us make a mistake in the multiplication table" (R.G. Hawtrey, Currency and Credit)

Pembangunan nasional sebagaimana yang kita cita-citakan tidak hanya merupakan pembangunan ekonomi, jelas tidak di dalam jangka panjang. Namun bila di dalam jangka pendek, "pembangunan ekonomi" yang didahulukan, demi memenuhi prasyarat

usaha pembangunan yang sehat, ada bahaya bahwa pendidikan dianggap sebagai proses transformasi yang menghasilkan (men-supply) tenaga kerja yang disesuaikan pada perubahan-perubahan pasaran kerja, berhubung perubahan-perubahan tersebut dianggap menunjukkan kondisi-kondisi pembangunan yang secara struktural (harus) seimbang. Menang bagi ekonomi, titik tolak yang wajar di dalam mengintegrir pendidikan ke dalam perencanaan ekonomi adalah konfrontasi antara kebutuhan antara tenaga-kerja yang ditimbulkan oleh proses pembangunan ekonomi di satu pihak dengan arus penawaran tenaga kerja yang dihasilkan oleh sistim pendidikan di lain pihak, satu dan lain demi pemuasan tuntutan alokasi tenaga kerja yang efisien.

Di dalam approach keperluan akan tenaga kerja (manpower-requirements approach) jumlah tenaga-tenaga kerja yang dibutuhkan dihitung dari jumlah pendapatan nasional yang direncanakan atau diperhitungkan akan dicapai.

Dengan perkataan lain, anak didik (educand), melalui sistim pendidikan, harus disiapkan menjadi tenaga kerja dan perencanaan mengenai keperluan akan tenaga kerja harus diintegrir ke dalam rangka yang menyeluruh dari perencanaan ekonomi. Jadi di dalam merencanakan keperluan akan tenaga kerja, perkembangan ekonomi di masa depan dianggap sebagai variabel yang independen, karena ia diperlakukan sebagai tujuan (target) yang ditetapkan secara tersendiri sebelumnya.

Bila pendidikan dipolakan untuk menyiapkan tenaga kerja, maka jumlah kebutuhan akan tenaga kerja tersebut dihitung berdasarkan perkembangan pendapatan nasional di masa depan. Proses perhitungan ini kiranya dapat disimpulkan melalui enam tahapan pokok:

- (1) Proyeksi produksi (output) dari sektor-sektor industri yang dihitung berdasarkan tingkat perkembangan pendapatan nasional yang ditetapkan secara independen;
- (2) taksiran mengenai perkembangan tingkat produktivitas tenaga kerja sektor-sektor industri;
- (3) perkembangan produksi dan perubahan-perubahan produktivitas sektor-sektor industri menentukan jumlah bahan-bahan (input) yang diperlukan;
- (4) perincian dari keseluruhan tenaga kerja (labour input) yang diperlukan ke dalam berbagai jenis (kategori) pekerjaan;
- (5) jenis-jenis pekerjaan dinyatakan ke dalam jenis-jenis dan tingkat-tingkat pendidikan yang diperlukan;

(6) kemudian dihitung jumlah tenaga kerja yang harus dihasilkan oleh sistim pendidikan di tahun-tahun yang akan datang.

Jadi menurut approach tersebut di atas perhitungan kebutuhan akan tenaga kerja dan perencanaan pendidikan yang dijuruskan ke arah pembentukan tenaga kerja dianggap sebagai satu prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang (secara struktural) seimbang dan bagi sistim pendidikan yang fungsional. Kebutuhan akan tenaga kerja yang disimpulkan (derived) semata-mata dari pertumbuhan ekonomi di masa depan dianggap relevant bagi alokasi yang efisien dari tenaga kerja dan bagi penggunaan yang optimal dari sumber-sumber (resources) yang tersedia pada sistim pendidikan.

Cara pendekatan persoalan pendidikan seperti ini kiranya dapat dikatakan suatu approach "ekonomi uni-dimensional" atau approach "pendidikan yang dijuruskan pada pasaran kerja", di mana pembiayaan-pembiayaan pendidikan pada azasnya diperlakukan sebagai "pengeluaran konsumsi" dan bukan sebagai "pengeluaran-pengeluaran investasi" dan di mana kapasitas absorpsi masyarakat terhadap benda konsumsi yang bernama "pendidikan" tersebut semata-mata ditentukan oleh struktur dan trend pertumbuhan modal nyata (tangible capital) yang dipekerjakan di dalam ekonomi masyarakat.

Bila demikian, di dalam merencanakan perkembangan pendidikan, approach keperluan akan tenaga kerja tersebut, menurut hemat kami, mengabaikan faktor-faktor dan kepentingan-kepentingan yang lain dari faktor-faktor dan kepentingan-kepentingan ekonomi dan secara implisit menetapkan pula suatu order hierarkis terhadap permintaan-permintaan yang saling bersaing terhadap sistim pendidikan.

Di pihak lain, walaupun kita tetap membatasi diri pada pemikiran ekonomi semata-mata, hipotesis yang menjadi dasar approach tersebut, yaitu tingkat kemajuan teknik yang otonom, kami anggap tidak sesuai dengan kenyataan. Eutankah konsep tingkat kemajuan teknik yang otonom, menganggap bahwa penggunaan tenaga kerja (labour input) hanya merupakan dependent variable dari perubahan teknis ekonomis. Padahal terbukti bahwa penemuan-penemuan (innovations) dan pemikiran2 baru yang menimbulkan perubahan-perubahan teknis itu tidak hanya hasil dari aktivitas-aktivitas yang memang dijuruskan secara sadar ke arah penemuan baru tersebut pada masa-masa sebelumnya, tetapi telah timbul secara spontan di dalam proses

produksi, sebagian sebagai akibat perlipat-gandaan tenaga-tenaga ahli yang telah dipkerjakan sebelumnya, sebagian lagi karena perubahan-perubahan nilai serta pandangan hidup, motif kerja, hubungan dan pandangan tradisionil masyarakat yang secara sadar atau tidak sadar mempengaruhi sikap dan perbuatan para tenaga kerja. Jadi variabel independen dari approach keperluan akan tenaga kerja, yaitu pertumbuhan pendapatan nasional dan perkembangan teknik yang etenor, mewakili hanya sebagian dari variabel-variabel yang sebenarnya menentukan keperluan, kebutuhan dan penggunaan tenaga kerja.

II. Approach kultural pembentukan tenaga kerja

"Damn Economics! Let us build a decent world". (F.V. Hayek, Road to serfdom)

Pemintaan masyarakat akan "pendidikan" adalah fungsi dari satu kompleks set dari pertimbangan-pertimbangan dan determinan-determinan. Permintaan yang diajukan oleh para orang tua murid dan para mahasiswa akan pendidikan yang kontinu hanya sebagian saja, dan secara samar-samar, berhubungan dengan keperluan-keperluan akan tenaga kerja dan kesempatan kerja di masa depan. Hal ini jelas terlihat pada perbedaan-perbedaan di dalam pendaftaran pada perguruan-perguruan menengah dan tinggi di kalangan kelompok-kelompok socio-ekonomis masyarakat; perbedaan-perbedaan tersebut dalam dirinya mencerminkan adanya pengaruh status ekonomi serta variabel-variabel sosiologis dan psikologis atas permintaan pendidikan.

Konang tidak dapat dimungkiri kenyataan bahwa sebagian permintaan akan kategori pendidikan-pendidikan tertentu semata-mata karena kekurangan pengetahuan ataupun pengertian mengenai perkembangan pasaran kerja dan kesempatan kerja di masa depan, karena ketidak-pastian mengenai pilihan atas jabatan-jabatan, sebagai akibat kurangnya penerangan resmi dan akibat tidak adanya rencana pendidikan yang integral dengan rencana pembangunan. Hal-hal yang disebut terakhir ini pada gilirannya menimbulkan pengangguran-pengangguran di kalangan lulusan-lulusan pendidikan tertentu. Namun begitu pendidikan per se kiranya harus dilihat sebagai satu hak asasi manusia yang pokok di dalam setiap masyarakat dan sebagai satu nilai di dalam dirinya sendiri yang, bila dipandang dari sudut

culturo-politik -- demi penyempurnaan jalannya demokrasi dan pertumbuhan kebebasan pribadi¹ anggota-anggota masyarakat -- tidak akan sia-sia dan karenanya tidak akan pernah merupakan hal yang berlebih-lebihan. Kesanggupan membaca dan menulis yang merata dan keharusan belajar itu sendiri pada umumnya sudah dianggap sebagai tujuan politik yang penting terlepas dari persoalan strategi pendidikan yang dijuruskan ke arah meningkatkan pembangunan nasional secara maksimum.

Kalaupun di dalam membahas persoalan pemelaan dan perencanaan pendidikan kita hendak membatasi diri pada rangka pembangunan ekonomi, menurut hemat kami, pembangunan ekonomi tidak boleh semata-mata sebagai "pertumbuhan pendapatan nasional per capita". Pembangunan ekonomi secara essensial adalah "pertumbuhan" dan "perubahan". Bukanlah pertumbuhan lebih dahulu dan kemudian baru menyusul perubahan, menurut satu order kronologis di dalam dimensi waktu. Sebab, pertumbuhan dapat juga terjadi melalui mutasi dan perubahan, sama halnya dengan timbulnya perubahan sebagai akibat adanya pertumbuhan.

Perubahan, yaitu keseluruhan dari proses transisi dari struktur masyarakat yang statis² ke arah sistem sosial yang dinamis³ serta modernisasi masyarakat, harus dianggap sebagai bagian dari pembangunan. Bahkan dapat dikatakan bahwa bagi negara-negara muda yang sedang membangun, inovasi (pendapatan dan pemikiran baru) mengenai rangka socio-kultural dari produksi adalah jauh lebih penting sebagai prasyarat dan penggerak pertumbuhan ekonomi.

¹Kebebasan di sini kami artikan sebagaimana yang kami ajukan di dalam tulisan kami sebelum ini; Daed Joesoef, Biantoro Wanandi, P. Simandjuntak dan M. H. Soesastro, "Pendidikan, Kebebasan dan Pembangunan Masyarakat", Pikiran dan Gagasan, No. 5 (S.Ch.), 1970

²Struktur masyarakat yang statis ditandai antara lain oleh stratifikasi masyarakat yang didasarkan pada norma-norma tradisional dan religius, cara-cara produksi dan administrasi tradisional, kehidupan politik yang otoriter, pembagian pendapatan yang pincang.

³Berdasarkan pada persamaan dalam kesempatan, mobilitas sosial baik vertikal maupun horizontal dan struktur sosial yang bersifat "meritocratic".

Ilaka surbangan positif yang dapat diberikan oleh pendidikan adalah, sebagaimana pula telah terbukti dalam banyak negara yang perekonomiannya masih terbelakang, bahwa ia menggerakkan pembangunan ekonomi pertama-tama dan terutama melalui aksinya terhadap prasarana sosio-kultural. Ia mempengaruhi, merombak, merubah¹ dan membentuk lembaga-lembaga sosial dan kultural. Ia mendorong sikap individu ke arah efektifitas dan integritas dan sikap komunal ke arah rasionalitas dan fungsional. Ia membentuk anggota-anggota masyarakat menjadi tidak hanya pendukung-pendukung budaya tetapi lebih-lebih menjadi pengolah-pengolah budaya². Jadi, berhadapan dengan kondisi-kondisi kemasyarakatan sebagaimana yang dihadapi oleh negara-negara muda seperti Indonesia, sumbangan pendidikan pada pembangunan ekonomi, menurut hemat kami (approach kultural) seharusnya untuk sebagian terbesar terdiri dari "pengaruh inovatif" (innovative effects) terhadap kondisi-kondisi kemasyarakatan yang menghambat perkembangan pembangunan. Supaya pendidikan dapat memenuhi harapan-harapan tersebut, cara dan isi pendidikan harus dipelajari demikian rupa sehingga ia dapat menirbulkan dan mendorong hasrat (motivasi) untuk kemajuan, hasrat untuk pembaharuan, perubahan, inisiatif, adaptasi serta kapasitas dan hasrat untuk belajar terus menerus, di samping membangun kecakapan teknis-instrumental sebagaimana yang menjadi target approach keperluan akan tenaga kerja; sebab kecakapan teknis-instrumental tersebut, betapapun penting efeknya, ternyata kurang efektif dalam menggerakkan roda pembangunan.

¹Yaitu perubahan-perubahan mengenai: lembaga kehidupan, struktur dan cara organisasi tradisional dan motivasi serta nilai-nilai kehidupan yang dianut oleh anggota-anggota masyarakat.

²Pendukung budaya adalah orang yang dengan setia meneruskan nilai-nilai hidup dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Tetapi nilai-nilai yang membuat sesuatu masyarakat hidup dari masa ke masa tidak dengan sendirinya merupakan nilai-nilai yang membuat masyarakat yang bersangkutan maju dan berkembang. Untuk kemajuan ini diperlukan adanya pengolah-pengolah budaya, yaitu orang yang sanggup merubah dan membentuk kembali nilai-nilai usang, guna lebih fungsional dan sesuai dengan syarat-syarat baru yang dituntut oleh masa baru. Hal ini menjadi lebih jelas bila diingat bahwa perkembangan teknologi tidak hanya begitu saja dapat dipindahkan dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya, karena teknologi itu juga merupakan bagian dari nilai kehidupan ataupun kebudayaan masyarakat yang menciptakannya; ia tumbuh dari kebudayaan yang dihayati oleh masyarakat yang bersangkutan. Teknologi adalah (bagian dari) kebudayaan.

Berhadapan dengan konsep "effisiensi alokatif tenaga kerja tenaga kerja, yaitu konsep teoritis yang merupakan latar belakang kalkulasi approach keperluan akan tenaga kerja, approach kulturil pembentukan tenaga kerja mengajukan konsep "effisiensi inovatif tenaga kerja", karena approach yang terakhir ini sadar bahwa persoalan alokasi tenaga kerja yang efisien, yang pada gilirannya diilhami oleh "teori produktivitas marginal"¹, mengabaikan kondisi dan implikasi perubahan-perubahan inovatif di dalam sistim produksi dan proses bekerja yang sangat menentukan perkembangan ekonomi. Tetapi konsep effisiensi inovatif tenaga kerja ini tidak terbatas pada sfer teknis dan ekonomis dari perubahan-perubahan teknologi produksi. Konsep ini meliputi pula, bahkan pertama-tama, proses transisi struktur sosial yang, sebagaimana telah disebut di atas, merupakan elemen primordial bagi perkembangan ekonomi.

Demikian pengolahan lebih lanjut dari konsep effisiensi inovatif melalui pengamatan-pengamatan empiris kiranya dapat disusun elemen-elemen dari satu repertoire tugas atau peranan yang diperlukan di dalam pelaksanaan sesuatu pekerjaan atau jabatan di satu pihak dan elemen-elemen dari kualifikasi khusus sebagai akibat langsung atau tak langsung dari pendidikan di lain pihak. Kedua hal tersebut, yang dalam dirinya dapat pula dinyatakan sebagai permintaan dan penawaran akan tenaga kerja, dinyatakan secara skematis dalam diagram di halaman 37. Dari diagram tersebut dapat dilihat bahwa pekerjaan atau jabatan teknikal-instrumental di satu pihak dan kompetensi professionil di lain pihak, masing-masing dalam dirinya merupakan "inti" dari pekerjaan atau jabatan dan kualifikasi yang spesifik, yang masing-masing kemudian diliputi oleh elemen-elemen tambahan berupa berbagai syarat pekerjaan (di pihak permintaan akan tenaga kerja) dan bermacam elemen kualifikasi (di pihak penawaran akan tenaga kerja), yang secara normal tidak disebut-sebut baik di dalam definisi sesuatu pekerjaan ataupun jabatan maupun di dalam sesuatu ijazah formil. Walaupun bukan "inti", melainkan merupakan "tambahan", syarat-syarat kerja dan elemen-elemen kualifikasi tersebut bukan tidak mempunyai arti di dalam merekrut tenaga kerja dan bagi usaha membentuk tenaga

¹Yang secara tradisional dipakai untuk menentukan keseimbangan perkembangan ekonomi dalam suasana perubahan teknik yang dianggap eksogin.

kerja. Ada baiknya ditegaskan bahwa arti (weight) relatif dari tambahan syarat-syarat pekerjaan dan tambahan elemen-elemen kualifikasi tersebut adalah berbeda-beda menurut jenis dan tingkat pekerjaan atau jabatan dan bahwa konsep efisiensi inovatif tenaga kerja terutama mengenai syarat-syarat dan elemen-elemen tambahan tersebut.

Cara pendekatan perscalan pendidikan dalam rangka pembangunan ekonomi yang lebih luas ini pada azasnya menganggap pembiayaan pendidikan yang telah dikeluarkan oleh masyarakat sebagai satu "pengeluaran investasi", yaitu satu "human investment". Pendidikan di sini bukan saja diakui dapat mendorong pembangunan tetapi pendidikan itu sendiri diperlukan sebagai tujuan suci pembangunan. Sebab bila pembangunan dapat dianggap sebagai kebangkitan sesuatu bangsa, pendidikan seharusnya dianggap sebagai kebangkitan pikiran, intelek dan rohani manusia individu.

Bila di dalam approach tenaga kerja kapasitas absorpsi masyarakat terhadap "hasil-hasil" pendidikan ditentukan oleh struktur dan trend pertumbuhan modal nyata yang dipekerjakan di dalam ekonomi masyarakat, di dalam approach kulturil kapasitas absorpsi adalah fungsi dari efisiensi inovatif dari tenaga-tenaga kerja yang dipekerjakan.

Penutup

"Manusia adalah finalitas dari pendidikan"

Pendidikan adalah faktor pendorong bagi produksi. Ia mengembangkan produktivitas faktor-faktor produksi lainnya. Ia membangun, menyebar-luaskan dan mempertinggi mutu kecakapan manusia. Ia mendorong penemuan-penemuan (innovations) dan karenanya mendorong dan memperlebar perubahan-perubahan di bidang kehidupan yang dituntut oleh zamannya.

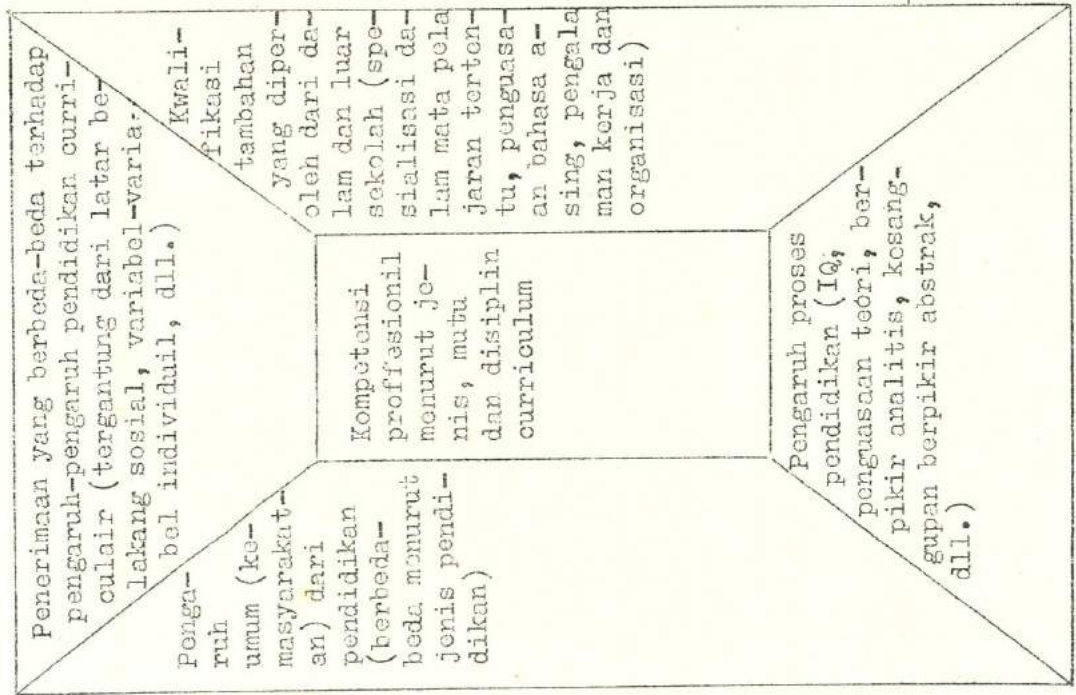
Ada permintaan akan "pendidikan" karena orang membutuhkan pendidikan itu sendiri dan bukan hanya karena orang membutuhkan apa-apa yang dihasilkan oleh pendidikan itu, walaupun hasil itu bernama "tenaga kerja". Pendidikan mempunyai "tujuan" (vocation) dan "panggilannya" sendiri. Tujuannya adalah manusia, sebagai keseluruhan, yang tidak mungkin dicapai oleh "pembangunan", karena manusia bukanlah satu konsep yang tetap (fixed) tetapi konsep yang terus tumbuh dan berkembang.

Tanggilannya adalah kebenaran, yang harus terus menerus dicari walaupun banyak halangan dan rintangan, melampaui semua batas, termasuk batas yang berupa kapasitas modal nyata yang digaris-kani oleh rencana pembangunan ekonomi.

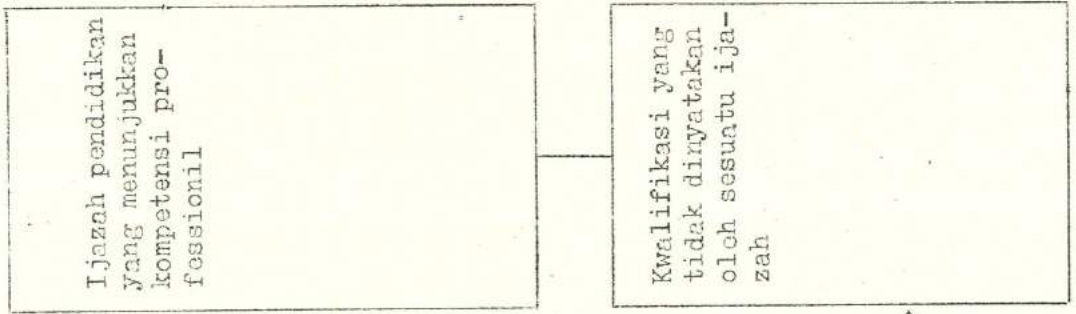
Hal ini bukanlah berarti bahwa di dalam pelaksanaan dan merencanakan perkembangan pendidikan di masa depan, kita harus atau dapat mengabaikan sama sekali prospek pembangunan ekonomi di masa depan. Hal ini hanya ingin mengingatkan bahwa sumbangan pendidikan pada pembangunan sama sekali tidak boleh dijadikan alasan untuk mengkobiri dimensi pendidikan itu sendiri, apalagi meredusir manusia menjadi hanya pelengkap modal nyata.

Pembangunan adalah sekaligus pertumbuhan dan perubahan. Perencanaan tenaga kerja, sebagaimana yang didasarkan pada approach tenaga kerja, mengabaikan elemen-elemen penting, bahkan elemen-elemen yang menentukan sekali, bagi sesuatu kebijaksanaan pendidikan yang ditujukan guna mendorong pembangunan ekonomi dan sosial. Kualifikasi yang diperlukan oleh efisiensi inovatif dari tenaga kerja tidak dapat disimpulkan (derived) dari perkembangan ekonomi di masa depan sebagaimana yang dilakukan oleh approach keperluan akan tenaga kerja. **Karenanya** pemolaan dan perencanaan pendidikan perlu didasarkan pada analisa mengenai isi proses pendidikan dan implikasinya atas orientasi, kompetensi dan sikap anak didik di satu pihak dan pengamatan (investigation) mengenai sumbangan-sumbangan potensiil sistim pendidikan pada perubahan-perubahan ekonomi dan sosial di pihak lain. Di samping ini, sebagai pelengkap, diperlukan pula analisa mengenai kapasitas absorpsi ekonomi masyarakat terhadap tenaga kerja terdidik dan terlatih dan determinan-determinannya, terutama sejauh yang mengenai kualifikasi dan sikap tenaga kerja yang dipekerjakan.

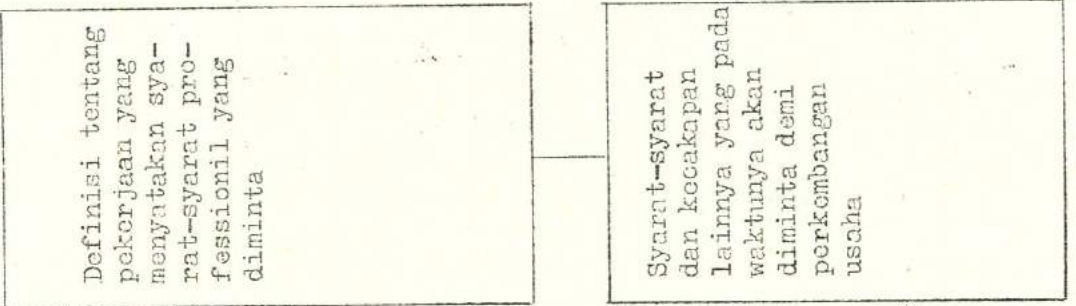
Elemen-elemen kualifikasi



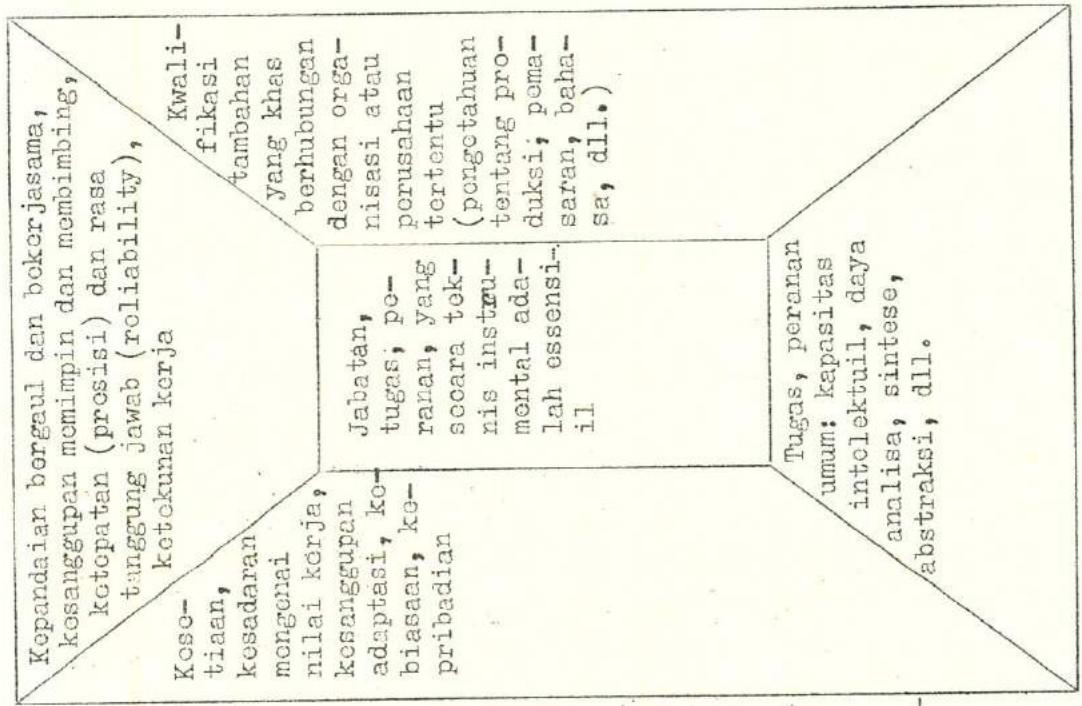
Penawaran akan tenaga kerja



Permintaan akan tenaga kerja



Syarat-syarat pelaksanaan tugas



Elemen-elemen kualifikasi penawaran tenaga kerja dan elemen-elemen tuntutan pelaksanaan pekerjaan

DAFTAR BACAAN:

- Dased Joeseef, "Eta, Universitas dan pembentukan Lanusia", Pikiran dan Gagasan, no. 4, (S.Mas.), 1970.
- Dased Joeseef, Dianoro Wanandi, Pinter Simandjuntak dan H. Hadi Soesastro, "Pendidikan, Kebebasan dan Pembangunan Masyarakat", Pikiran dan Gagasan, no. 5 (s.3h.) 1970.
- E.J.S. Kardjoesono, "Analisa Problematik Pendidikan-Pengajaran di Indonesia", loc.cit.
- Henri Diouzeido, "Educational Technology and Development of Education", International Education Year 1970 (Paris: UNESCO, 1970).
- Liong Tjong Tiat, "An Existentialist Approach to Education", Lodan Ilmu Pengetahuan, no. 3, Djuli 1961.
- Malcolm S. Adisoshiah, Let My Country Awake (Paris: UNESCO, 1970).
- Mashuri, Menteri P dan Y, "Frasaran mengenai persoalan pendidikan", diutjapkan dimuka Lusyawarrah Nasional Mahasiswa, di Bogor, 14-21 Des. 1970.
- idon, "Basic Memorandum Tentang Pendidikan", kertas-kerdja, 25 Nov. 1970.
- H. Hadi Soesastro, "Desa dan Kepentingan Nasional", Pikiran dan Gagasan, no. 4, (S. Mas.), 1970.
- "Programme of Educational Assistance to the Five-Year Plan", Draft for a Report by the Minister of Education, Instalment I dan II, Djuli 1968.
- H. Harjoseputro, "Membentuk Lanusia Indonesia Baru", Kumpulan Kertas-Karya Konferensi Ilmiah ke-3, Pikiran dan Gagasan, 1970.
- Wolfgang Arnbruster and Hans-Joachim Eckenhöfer, "Manpower Approach versus Cultural Approach to Educational Planning", International Industrial Relations Association, 1970.